



Better
anyumas

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENCANA KERJA 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN JATILAWANG**

JALAN RAYA JATILAWANG NO 1 JATILAWANG

KECAMATAN JATILAWANG



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Kata Pengantar	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023	6
2.2 Analis Kinerja Perangkat Daerah	37
2.3 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	44
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	49
BAB IV PENUTUP.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Kecamatan Jatilawang.....	8
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 Kecamatan Jatilawang	23
Tabel 2.3 Kegiatan dengan Target Terendah.....	34
Tabel 2.4 Rencana Program dan Prakiraan Maju Tahun Anggaran 2025	38
Tabel 3.1 Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	50

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* dan atau *outcome* yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Rencana Kinerja Kecamatan Jatilawang Tahun 2024 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024 merupakan tahun lanjutan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas maupun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Tahun 2024-2026.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan dokumen selanjutnya. Semoga dokumen yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang bekepentingan.

Jatilawang, Januari 2024
CAMAT JATILAWANG

R. BIAN ANDIYONO L.S., S.K.M., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691006 19903 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan dilakukan sebagai wujud dan bentuk kepastian bahwa sumber daya yang dipergunakan optimal dan mewujudkan cita-cita pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagai siklus dinamis dipengaruhi kondisi lingkungan strategis regional dan nasional bahkan internasional. Perubahan lingkungan strategis harus dapat diadaptasi dengan perubahan perencanaan untuk menyesuaikan tujuan dan prioritas pembangunan sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai dengan penyesuaian terhadap berbagai perubahan.

Renja Tahun 2024 merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD 2024 yang disertai dengan upaya mendukung percepatan pencapaian target maupun mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan sampai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penyusunan dokumen Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi pemerintah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
16. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
17. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventaris Gas Rumah Kaca;
18. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012- 2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014;
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2024;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;

33. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
34. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2024 adalah menyesuaikan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2023 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tujuannya sebagai pedoman Kecamatan Jatilawang dalam implementasi RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung visi misi Pemerintahan Kabupaten Banyumas.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB II RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan Penetapan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 dan Capaian Analisis Kinerja sampai dengan indikator kinerja kegiatan Tahun Anggaran 2023.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Rencana Kerja Kecamatan Jatilawang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Jatilawang. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatilawang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Jatilawang selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitas dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Analisis capaian kinerja Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas disajikan dalam rekapitulasi evaluasi hasil kerja tahunan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023
Kecamatan Jatilawang

Tujuan/Sasaran / Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2023	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2022	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023										
							1		2		3		4															
3	4	4A	5		6		7						8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	DPA INDUK		DPA PERUBAHAN		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp
									K	Rp	K	Rp																
[TUJUAN]Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima																												
[INDTUJUAN]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan		86		85.75		86		86		86		0	80		90.5		88.75		88.5		103.2		88.5		103.2		
[SASARAN]Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat																												
[INDSASARAN]	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	100		100		100		100		100		100	100		100		100		100		100		100		100		

[PROGRAM]PRO GRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA								2.467.9 68.800		2.467.9 68.800		3.202.8 82.245		359.4 61.55 4		855.4 06.60 1		556.0 71.02 9		1.295.3 34.534		3.066.2 73.718		95 .7 3			
[INDPROGRAM]	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Jatilawang	%	1 0 0		10 0		1 0 0		1 0 0		1 0 0		1 0 0		1 0 0			10 0		10 0		10 0		10 0		100	
[INDPROGRAM]	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Jatilawang	%	1 0 0		10 0		1 0 0		1 0 0		1 0 0		1 0 0		1 0 0			10 0		10 0		10 0		10 0		100	
[INDPROGRAM]	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai kecamatan jatilawang	%	1 0 0		10 0		1 0 0		1 0 0		1 0 0		1 0 0		1 0 0			10 0		10 0		10 0		10 0		100	
[INDPROGRAM]	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan , Penganggara n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Jatilawang	%	1 0 0		10 0		1 0 0		1 0 0		1 0 0		1 0 0		1 0 0			10 0		10 0		10 0		10 0		100	

[KEGIATAN]Pere ncanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								1.575.0 00		1.575.0 00																	
[INDKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	doku men	5		4		5		5		5		5		0		2		4		11		22 0		15		300
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								525.00 0		525.00 0																	
[INDSUBKEGIAT AN]	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Doku men	3		3		3		3		3		0		0		3		0		3		10 0		6		200
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								1.050.0 00		1.050.0 00																	
[INDSUBKEGIAT AN]	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lapora n	1		2		1		1		1		1		1		0		0		2		20 0		4		400
[KEGIATAN]Admi nistrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.730.0 72.539		1.730.0 72.539		2.006.7 60.984		307.5 82.91 4		727.6 84.55 6		428.9 79.39 6		480.55 5.081		1.944.8 01.947		96 .9 1			
[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	jenis	1 2		12		1 2		1 2		1 2		3		6		9		12		12		10 0		12		100

[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							1.704.4 22.539		1.704.4 22.539		1.978.3 35.984		307.5 82.91 4		718.6 84.55 6		419.9 79.39 6		473.80 5.081		1.920.0 51.947		97 .0 5					
[INDSUBKEGIAT AN]	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan	1 6		17		1 6		1 6		1 6		1 7		1 7		17		15		15		93. 75		15		93. 75	
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							25.650. 000		25.650. 000		28.425. 000				9.000. 000		9.000. 000		6.750.0 00		24.750. 000		87 .0 7					
[INDSUBKEGIAT AN]	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Doku men	4		0		4		4		4		1		1		1		1		4		10 0		4		100	
[KEGIATAN]Admi nistrasi Umum Perangkat Daerah							177.74 1.670		177.74 1.670		463.87 3.670				29.81 7.910		33.87 2.400		359.80 6.151		423.49 6.461		91 .3					
[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi umum yang dikelola	jenis	5		6		5		5		5		5		5		5		5		5		10 0		5		100	
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor							5.182.0 00		5.182.0 00		5.182.0 00				775.0 00		1.442. 000		2.830.5 00		5.047.5 00		97 .4					

[INDSUBKEGIAT AN]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4		0	4		4		4		1		1		1		1		4		100		4		100	
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						29.916.000		29.916.000		35.162.000					7.246.500		27.815.500		35.062.000		99.72					
[INDSUBKEGIAT AN]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4		0	4		4		4		1		1		1		1		4		100		4		100	
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.223.670		10.223.670		9.245.670			1.140.000		3.350.000		3.254.670		7.744.670		83.77					
[INDSUBKEGIAT AN]	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4		0	4		4		4		1		1		1		1		4		100		4		100	
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						86.390.000		86.390.000		171.973.000			21.265.000		10.472.000		120.766.034		152.503.034		88.68					
[INDSUBKEGIAT AN]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4		0	4		4		4		1		1		1		1		4		100		4		100	
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						7.665.000		7.665.000		7.915.000			140.000		1.916.900		3.690.550		5.747.450		72.61					

[INDSUBKEGIAT AN]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4		0		4		4		4		1		1		1		6		9		225		9		225	
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								38.365.000		38.365.000		234.396.000			6.497.910		9.445.000		201.448.897		217.391.807			92.75				
[INDSUBKEGIAT AN]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4		0		4		4		4		3		1		3		6		13		325		13		325	
[KEGIATAN]Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												16.342.000							16.342.000		16.342.000			0				
[INDKEGIATAN]	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	unit	2		2		2		2		2		0		0		0		2		2		100		4		200	
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel																								0				
[INDSUBKEGIAT AN]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4		2		4		4		4		0		0		0		0		0		0		2		50	
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												16.342.000							16.342.000		16.342.000			0				
[INDSUBKEGIAT AN]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2		7		2		2		2		0		0		0		2		2		100		9		450	

[KEGIATAN]Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								373.99 9.591		373.99 9.591		366.77 5.591		51.87 8.640		93.45 0.135		83.58 1.733		130.46 1.702		359.37 2.210		97 .9 8				
[INDKEGIATAN]	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	jenis	4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		10 0		4		100	
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								45.693. 751		45.693. 751		45.693. 751				10.98 2.175		5.763. 773		22.576. 422		39.322. 370		86 .0 6				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 2		0		1 2		1 2		1 2		3		3		3		3		12		10 0		12		100	
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								4.650.0 00		4.650.0 00		4.650.0 00				4.650. 000						4.650.0 00		10 0				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4		0		4		4		4		1		0		0		0		1		25		1		25	
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								323.65 5.840		323.65 5.840		316.43 1.840		51.87 8.640		77.81 7.960		77.81 7.960		107.88 5.280		315.39 9.840		99 .6 7				

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	12	12	12	12	12	3	3	3	3	12	100											
[KEGIATAN]Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							184.580.000	184.580.000	349.130.000			4.454.000	9.637.500	308.169.600	322.261.100	92.3										
[INDKEGIATAN]	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	jenis	20	5	20	20				20	2	4	8	20	20	100										
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							28.000.000	28.000.000	42.550.000			3.149.000	7.627.500	14.926.000	25.702.500	60.41										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10	10	10	10				10	8	6	13	7	34	340										
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							16.580.000	16.580.000	16.580.000			1.305.000	2.010.000	7.120.000	10.435.000	62.94										

[INDSUBKEGIAT AN]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1 5		24		1 5		1 5		1 5		6		3		2		4		15		10 0		39		260	
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								140.00 0.000		140.00 0.000		290.00 0.000							286.12 3.600		286.12 3.600		98 .6 6					
[INDSUBKEGIAT AN]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	Unit	1		5		1		1		1		0		0		1		3		3		30 0		3		300	
[PROGRAM]PRO GRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								9.750.0 00		9.750.0 00		9.750.0 00																
[INDPROGRAM]	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik kecamatan Jatilawang	%	1 0 0		10 0		1 0 0		1 0 0		1 0 0		1 0 0		1 0 0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		100	
[KEGIATAN]Pela ksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								9.750.0 00		9.750.0 00		9.750.0 00																

[INDKEGIATAN]	Jumlah kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kegiatan	2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		100				
[INDKEGIATAN]	Jumlah Jenis Pelayanan Di Kecamatan	jenis	1		2		1		1		1		1		2		2		2		2		200				
[INDKEGIATAN]	Jumlah Jenis Pelayanan Di Kecamatan	jenis	1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		200				
[INDKEGIATAN]	Jumlah kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kegiatan	2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		100				
[SUBKEGIATAN] 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan								500.00 0		500.00 0		500.00 0															
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	12		0		12		12		12		3		3		3		3		12		100				

[SUBKEGIATAN] 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								9.250.0 00		9.250.0 00		9.250.0 00															
[INDSUBKEGIAT AN]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lapora n	7		0		7		7		7		1		3		3		2		9		12 8.5 7		9		128 .57
[PROGRAM]PRO GRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								7.000.0 00		7.000.0 00		6.500.0 00			5.130. 000				1.120.0 00		6.250.0 00		96 .1 5				
[INDPROGRAM]	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdaya an masyarakat Kecamatan Jatilawang	%	1 0 0		10 0		1 0 0		1 0 0		1 0 0		1 0 0		1 0 0		10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		100
[KEGIATAN]Koor dinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								7.000.0 00		7.000.0 00		6.500.0 00			5.130. 000				1.120.0 00		6.250.0 00		96 .1 5				
[INDKEGIATAN]	Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdaya an masyarakat	desa	1 1		11		1 1		1 1		1 1		1 1		1 1		11		11		11		10 0		11		100

[SUBKEGIATAN] 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								5.500.0 00		5.500.0 00		5.000.0 00								5.000.0 00		10 0					
[INDSUBKEGIAT AN]	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipas i dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa	Lemba ga	7		0		7		7		7		7		7		7		7		10 0		7		100		
[SUBKEGIATAN] 7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								1.250.0 00		1.250.0 00		1.250.0 00					130.0 00			1.120.0 00		1.250.0 00		10 0			
[INDSUBKEGIAT AN]	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Doku men	1		0		1		1		1		0		0		0		1		1		10 0		1		100

[SUBKEGIATAN] 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								250.00 0		250.00 0		250.00 0															
[INDSUBKEGIAT AN]	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lapora n	4		0		4		4		4		1		1		1		1		4		10 0		4		100
[PROGRAM]PRO GRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								45.250. 000		45.250. 000		68.050. 000				16.25 0.000		13.00 0.000		33.005. 000		62.255. 000		91 .4 8			
[INDPROGRAM]	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Jatilawang	%	1 0 0		10 0		1 0 0		1 0 0		1 0 0		5 0		1 0 0		84		10 0		10 0		10 0		10 0		100
[KEGIATAN]Koor dinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum								45.250. 000		45.250. 000		68.050. 000				16.25 0.000		13.00 0.000		33.005. 000		62.255. 000		91 .4 8			

	Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	kegiatan	1		6		1		1		1		1		2		0		1		1		100			
[INDKEGIATAN]																										
[SUBKEGIATAN] 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								45.250.000		45.250.000		68.050.000			16.250.000		13.000.000		33.005.000		62.255.000		91.48			
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2		0		2		2		2		1		1		1		1		4		200		4	200
[PROGRAM]PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								15.240.000		15.240.000		15.240.000						15.000.000		15.000.000		98.43				

	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Jatilawang	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
[INDPROGRAM]																										
[KEGIATAN]	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							15.240.000	15.240.000	15.240.000								15.000.000	15.000.000			98,43				
[INDKEGIATAN]	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	desa	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
[SUBKEGIATAN]	7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							240.000	240.000	240.000																
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	2	0	2	2	2	2	2	2	1	0	1	0	1	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
[SUBKEGIATAN]	7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan							15.000.000	15.000.000	15.000.000								15.000.000	15.000.000			100				

Sub Kegiatan 3	X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
3.1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	NON KUMULATIF/ POSITIF	Orang/bulan	17	16	17	17	17	15	15	93.75	▶				Gaji ASN yang dibayarkan 17 orang pada bulan Oktober , pada bulan Nopember dan Desember berkurang 2 karena pensiun jadi 15 orang
Sub Kegiatan 4	X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
4.1	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KUMULATIF/ POSITIF	Dokumen	0	4	1	1	1	1	4	100	●				Dokumen SPM Honor pengelola Keuangan
Sub Kegiatan 5	X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
5.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	KUMULATIF/ POSITIF	Paket	0	4	1	1	1	1	4	100	●				Jumlah paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia pada triwulan IV terealisasi 1 Paket
Sub Kegiatan 6	X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															

6.1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KUMULATIF/ POSITIF	Paket	0	4	1	1	1	1	4	100	●			Realisasi Triwulan IV : Terdapat 1 Paket yang terdiri dari: 1. Belanja ATK, 2 Kertas dan Cover 3. Belanja Benda Pos 4. Belanja Bahan Komputer		
Sub Kegiatan 7	X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
7.1	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	KUMULATIF/ POSITIF	Paket	0	4	1	1	1	1	4	100	●			Jumlah Jenis alat rumah tangga yang terealisasi pada triwulan IV yaitu belanja bahan isi tabung dan pembersih lantai, dan piring obat-obatan Rondap		
Sub Kegiatan 8	X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
8.1	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KUMULATIF/ POSITIF	Paket	0	4	1	1	1	1	4	100	●			Realisasi Triwulan IV Belanja 1 paket terdiri dari : Belanja BBM 3 Dokumen (bulan okt-		

															des) , Belanja makan minum Rapat , Belanja Minuman jamuan tamu , Belanja Bahan Natura		
Sub Kegiatan 9	X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
9.1	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	KUMULATIF/ POSITIF	Paket	0	4	1	1	1	6	9	225				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang trealisasi Triwulan IV Belanja 6 buah Banner (POKIR)		
Sub Kegiatan 10	X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
10.1	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KUMULATIF/ POSITIF	Laporan	0	4	3	1	3	6	13	325				Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada triwulan IV adalah : 1. Perjalanan Dinas sekitar Purwokerto serta Dinas		

																Luar Daerah ke NTT (Labuhan Bajo) , 2.Jogja Bantul 3. Bantul Slemqan 4. Bandung (Pemprof) , 5. Bandung (Desa Wisata Lokal Cibodas 6. Jakarta jumlah 6 Laporan (5 DL dana POKIR)			
Sub Kegiatan 11	X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel																		
Sub Kegiatan 12	X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
12.1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	KUMULATIF/ POSITIF	Unit	7	2	0	0	0	2	2	100					Belanja pengadaan satu paket CC TV Rp. 12. 492.000 , hardis eksternal Rp 3.850.000			
Sub Kegiatan 13	X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
13.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KUMULATIF/ POSITIF	Laporan	0	12	3	3	3	3	12	100					Laporan Pembayaran Langganan Air, Telepon, listrik, internet,			

	yang Disediakan														surat kabar selama bulan 1. Oktober 2. Nopember 3. Desember			
Sub Kegiatan 14	X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
14.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KUMULATIF/POSITIF	Laporan	0	4	1	0	0	0	1	25	▼	terdapat kesalahan target		Dilaksanakan 1 kali dalam satu tahun			
Sub Kegiatan 15	X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
15.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KUMULATIF/POSITIF	Laporan	0	12	3	3	3	3	12	100	●			Realisasi Triwulan III terbayarnya Honor Non ASN Tenaga Administrasi, Pengemudi, Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan 1. Laporan Bulan Oktober 2. Laporan Bulan Nopember 3. Laporan Bulan Desember			

Sub Kegiatan 16	X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
16.1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	KUMULATIF/POSITIF	Unit	10	10	8	6	13	7	34	340	●	kesalahan dalam penentuan target, hanya 10 kendaraan tidak memperhitungkan berapa kali pemeliharaannya		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1. Pemeliharaan kendaraan Roda empat 2 unit 2. Pajak kendaraan roda dua 3 unit 3. Pemeliharaan Roda dua 3 unit	
Sub Kegiatan 17	X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
17.1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	KUMULATIF/POSITIF	Unit	24	15	6	3	2	4	15	100	●			Pemeliharaan Serfis Laptop 1 unit, printer AC 3 unit	
Sub Kegiatan 18	X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
18.1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	NON KUMULATIF/POSITIF	Unit	5	1	0	0	1	3	3	300	●			Rehab bangunan Pagar keliling dan gorong2 depan, dapur ex rumah	

														dinas wedana (POKIR)		
Sub Kegiatan 19	7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan															
19.1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	KUMULATIF/ POSITIF	Laporan	0	12	3	3	3	3	12	100			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintah an yang trealisasi Triwulan II 1. Laporan Pelayanan Adminduk (Okt.- Des.) = 1 laporan 2. Laporan Pelayanan Legalisasi Umum (Okt. - Des.) = 1 laporan 3. Laporan Pelayanan Umum (Okt - Des.) = 1 laporan		
Sub Kegiatan 20	7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan															

20.1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KUMULATIF/POSITIF	Laporan	0	7	1	3	3	2	9	128.57	●			1. Laporan Realisasi PBB bulan Oktober s/d Desember terealisasi 74.12 %		
Sub Kegiatan 21	7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																
21.1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	NON KUMULATIF/POSITIF	Lembaga	0	7	7	7	7	7	7	100	●			Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musrembang : RT, RW, PKK, Karang Taruna, KWT, Posyandu, LPMD		
Sub Kegiatan 22	7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																
22.1	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	KUMULATIF/POSITIF	Dokumen	0	1	0	0	0	1	1	100	●			1. Dokumen kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat		
Sub Kegiatan 23	7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																

23.1	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KUMULATIF/POSITIF	Laporan	0	4	1	1	1	1	4	100				1 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan : 1 kegiatan dari bulan Oktober sampai dengan Desember		
Sub Kegiatan 24	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
24.1	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	KUMULATIF/POSITIF	Laporan	0	2	1	1	1	1	4	200				. Laporan kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintah Desa TW IV (tambahan dari POKIR)		
Sub Kegiatan 25	7.01.06.2.01.03 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																

25.1	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	KUMULATIF/POSITIF	Dokumen	0	2	1	0	1	0	2	100				Digeser ke Logistik		
Sub Kegiatan 26	7.01.06.2.01.06 Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																
26.1	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	KUMULATIF/POSITIF	Dokumen	0	1	0	0	0	1	1	100				Satu dokumen Pelaksanaan Pilkades pada tanggal 23 Oktober		

2.2. ANALISIS KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023. Anggaran Tahun 2023 Kecamatan Jatilawang baik belanja operasional maupun belanja modal sebesar Rp. 3.302.422.245 dimana belanja pegawai sebesar Rp. 1.728.572.539 dan belanja barang dan jasa Rp. 816.636.261 dengan 5 program dan 9 kegiatan serta 25 sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 3.149.778.718 dengan belanja pegawai sebesar Rp. 19.001.947 dan belanja Barang dan Jasa sebesar 950.634.671. Capaian kinerja fisik sebesar 97,01 % dan capaian kinerja keuangan sebesar 95,22 %.

Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas pada tahun anggaran 2023 telah melaksanakan seluruh program yang menjadi tanggungjawabnya. Gambaran keberhasilan capaian, tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas direpresentasikan oleh capaian indikator kinerja. Capaian indikator utama dari program dan kegiatan di Kecamatan Jatilawang sebagian besar sudah sesuai dengan apa yang ditargetkan dan ada yang melampaui target. Namun, untuk capaian sub kegiatan masih terdapat beberapa yang masih belum mencapai target maksimal.

Tabel 2.3
Kegiatan Dengan Target Terendah

No	Nama Kegiatan	Target	Capaian	Keterangan
1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/Bulan	93,75 %	2 Pegawai ASN pensiun

Faktor-faktor penyebab belum terpenuhinya target kegiatan dan sub kegiatan:

1. Pegawai pensiun,
2. Perubahan dan pergeseran anggaran

Kebijakan atau tindakan yang diambil dalam mengatasi penyebab tidak tercapainya kegiatan yaitu pengisian pegawai yang kosong. Namun hal itu tidak dapat dilaksanakan karena saat kekosongan pegawai bebarengan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Banyumas yang berakhir pada 24 September 2023. Sedangkan pegawai yang mengalami pensiun dimulai sejak 1 November 2023. Setelah berakhirnya masa jabatan bupati, Kabupaten Banyumas di kepalai oleh Pejabat Bupati Banyumas, dimana Pejabat Bupati Banyumas tidak bisa serta merta mengangkat pejabat, harus terlebih dahulu melalui persetujuan Mendagri.

Tabel 2.4
Rencana Program dan Prakiraan Maju Tahun Anggaran 2025

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
KECAMATAN JATILAWANG						2,924,814,000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					62,550,000	
7.01	KECAMATAN					62,550,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					9,200,000	KECAMATAN JATILAWANG
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86 Indeks		86.5 Indeks		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	100%	Kab. Banyumas	100%	1,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	Kab. Banyumas	4 Laporan	1,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan	100%	Kab. Banyumas	100%	1,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kab. Banyumas	12 Laporan	1,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	100%	Kab. Banyumas	100%	7,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta			Kab. Banyumas		7,000,000	KECAMATAN JATILAWANG

		Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	1 Unit		1 Unit		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	Kab. Banyumas	100%	200,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	Kab. Banyumas	4 Laporan	100,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	Kab. Banyumas	4 Laporan	100,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%		100%	15,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa	100%	Kab. Banyumas	100%	15,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Banyumas	4 Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	11 Laporan	Kab. Banyumas	11 Laporan	5,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100%		100%	200,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	100%	Kab. Banyumas	100%	200,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Kab. Banyumas		100,000	KECAMATAN JATILAWANG

		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan		
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	Kab. Banyumas	2 Laporan	100,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100%		100%	11,150,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	100%	Kab. Banyumas	100%	11,150,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	37 Orang	Kab. Banyumas	37 Orang	7,500,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	37 Orang	Kab. Banyumas	37 Orang	3,650,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes tepat waktu	100%		100%	27,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	100%	Kab. Banyumas	100%	27,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	Kab. Banyumas	4 Dokumen	6,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	Kab. Banyumas	4 Dokumen	6,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	Kab. Banyumas	6 Dokumen	15,000,000	KECAMATAN JATILAWANG

7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0 Dokumen	Kab. Banyumas	0 Dokumen	-	KECAMATAN JATILAWANG
X	NON URUSAN					2,862,264,000	
X.XX	NON URUSAN					2,862,264,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%		100%	2,862,264,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	Kab. Banyumas	7 Dokumen	4,661,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kab. Banyumas	3 Dokumen	2,368,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Banyumas	4 Laporan	2,293,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	Kab. Banyumas	100%	2,106,605,665	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/Bulan	Kab. Banyumas	18 Orang/Bulan	2,076,605,665	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Banyumas	12 Dokumen	30,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100%	Kab. Banyumas	100%	165,414,584	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Banyumas	5 Paket	6,255,884	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Banyumas	1 Paket	31,686,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kab. Banyumas	3 Paket	10,416,500	KECAMATAN JATILAWANG

X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Banyumas	12 Paket	15,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kab. Banyumas	5 Paket	15,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Banyumas	12 Laporan	85,856,200	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	Kab. Banyumas	2 Dokumen	1,200,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang	100%	Kab. Banyumas	100%	50,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kab. Banyumas	1 Unit	20,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Banyumas	1 Unit	15,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Banyumas	1 Unit	15,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100%	Kab. Banyumas	100%	418,393,751	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Banyumas	12 Laporan	50,693,751	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Laporan	Kab. Banyumas	27 Laporan	7,700,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Banyumas	12 Laporan	360,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	Kab. Banyumas	100%	117,189,000	KECAMATAN JATILAWANG

X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Banyumas		77,840,000	KECAMATAN JATILAWANG
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit		11 Unit		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kab. Banyumas	20 Unit	15,000,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Banyumas	3 Unit	19,350,000	KECAMATAN JATILAWANG
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Banyumas	1 Unit	4,999,000	KECAMATAN JATILAWANG

2.3. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu Strategis Perangkat Daerah

“Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan”

Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik termasuk organisasi pemerintahan. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan harus berorientasi pada kepentingan publik. Pemenuhan terhadap kepentingan publik secara substantif dan memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan. Dalam realitanya, masalah pelayanan publik masih menjadi pusat perhatian dan masih banyak yang menganggap pelayanan publik masih kurang optimal. Atau dengan kata lain masyarakat masih kurang puas dengan pelayanan yang ada saat ini. Beberapa masalah yang masih timbul yaitu masih kurang efisien, lamban, dan waktu penyelesaian. Beberapa faktor penyebab belum optimalnya pelayanan publik adalah faktor SDM, budaya birokrasi, inovasi birokrasi, teknologi informasi dan aturan yang diberlakukan.

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas menjadi pekerjaan rumah (PR) untuk dibenahi pemerintah. Khususnya pemerintah kecamatan yang terlibat langsung dalam pelayanan. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas, kecamatan perlu memperbaiki pelayanan yang telah ada menjadi pelayanan yang lebih berkualitas.

Hal ini tentu menjadi permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. Kecamatan Jatilawang mempunyai tugas peran strategis di bidang Pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai dan tentu saja anggaran yang memadai guna mendukung tercapainya Tujuan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.

Adapun susunan organisasi Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretaris Camat, terdiri dari:
 - 1) Kasubag Perencanaan dan Keuangan;

- 2) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
3. Kepala Seksi Pelayanan;
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Kepala Seksi Pemerintahan Desa;
6. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan;
7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, dalam pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantu.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
 - 1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika

serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - 4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - 7) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- c) koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
- 1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
 - 2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;
- d) koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:

- 1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan.
 - 3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati;
- e) koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati;
- f) koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - 3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati;
- g) koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
- 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2) efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- h) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

- i) pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
 - 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- j) penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- k) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara umum jenis pelayanan yang diberikan Kecamatan adalah pelayanan non perizinan yang meliputi:

- 1) Pembuatan KTP Elektronik;
- 2) Pembuatan KK;
- 3) Pembuatan Surat Keterangan Pindah;
- 4) Pembuatan Akta Kelahiran;
- 5) Pembuatan Akta Kematian;
- 6) Pembuatan KIA;
- 7) Administrasi non Kependudukan

Strategi yang dilakukan dalam mencapai tujuan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jatilawang yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan hasil capaian pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2023, uraian program dan kegiatan beserta plafon anggaran pada rencana kerja Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian		Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
									T - 1	Tahun					T + 1
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Jatilawang										Rp2.944.254.713	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.944.254.713	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				Rp2.944.254.713	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.944.254.713		
7	01				KECAMATAN				Rp2.944.254.713	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.944.254.713		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp2.894.754.713	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.894.754.713		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp4.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.500.000		
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp4.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.500.000		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp2.294.937.838	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.294.937.838		
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp2.280.637.838	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.280.637.838		
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp14.300.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.300.000		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp167.067.284	Rp0	Rp0	Rp0	Rp167.067.284		
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp5.144.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.144.500		
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp32.075.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp32.075.500		

7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp9.736.884	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.736.884	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp78.710.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp78.710.000	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp7.665.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.665.000	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp33.735.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp33.735.400	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp378.349.591	Rp0	Rp0	Rp0	Rp378.349.591	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp45.693.751	Rp0	Rp0	Rp0	Rp45.693.751	
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp9.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.000.000	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp323.655.840	Rp0	Rp0	Rp0	Rp323.655.840	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp49.900.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp49.900.000	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp49.900.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp49.900.000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.000.000	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.000.000	
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.000.000	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Rp39.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp39.500.000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				Rp39.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp39.500.000	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp39.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp39.500.000	

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Jatilawang Tahun 2024. Rencana Kerja (RENJA) akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada Kecamatan Jatilawang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2024, beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatilawang Tahun 2024 berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dan Renstra Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun sumber lain;
2. Kecamatan Jatilawang dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2024 dengan sebaik-baiknya;
3. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatilawang Tahun 2024 menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024;
4. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2024 mampu mendorong terwujudnya cita-cita Kabupaten Banyumas menuju “Banyumas Yang Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing, serta Lestari”

Jatilawang, Januari 2024

CAMAT JATILAWANG



R. DIAN ANDIYONO L.S., S.K.M., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691006 19903 1 006